

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
		IPP	I.01	Kepada Kepala Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo agar berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Pusat dan Provinsi untuk menyelaraskan jadwal dan anggaran dan kegiatan surveilans air pra dan pasca proyek sesuai dengan kondisi pelaksanaan dan penyelesaian proyek yang melebihi tahun anggaran	LAI-65/PW31/2/2016	ST-171/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS II Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2015	0
				Kepada Kepala Dinas Provinsi Gorontalo agar menginstruksikan kepada PPK dan bendahara Program Pamsimas II di lingkungan dinas kesehatan Provinsi Gorontalo untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku	LAI-65/PW31/2/2016	ST-171/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS II Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016	0
			I.02	Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan agar Berkoordinasi dengan PLN sektor Gorontalo untuk melakukan pemasangan travo dilokasi pabrik es	LAI-69/PW31/2/2016	ST-110/PW31/2/2016	Audit Laporan Keuangan Proyek CCDP IFAD LOAN No 1-880-ID, Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara	1
				Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan agar Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kekuatan struktur bangunan serta menginstruksikan penyedia barang/jasa untuk melakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku	LAI-69/PW31/2/2016	ST-110/PW31/2/2016	Audit Laporan Keuangan Proyek CCDP IFAD LOAN No 1-880-ID, Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara	1
			I.03	berkoordinasi dengan Satker Provinsi untuk menegur Tim Fasilitator Masyarakat Desa TanjungKarang, Pilohulata dan Iloheluma	LAI-74/PW31/2/2016	ST-173/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS Tahun Anggaran 31 Desember 2015 pada Dinas PU Kab. Gorontalo Utara	0
				menginstruksikan BP-SPAMS masing-masing desa penerima Program PAMSIMAS untuk segera melengkapi rencana kerja yang diperlukan.	LAI-74/PW31/2/2016	ST-173/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS Tahun Anggaran 31 Desember 2015 pada Dinas PU Kab. Gorontalo Utara	0
				berkoordinasi dengan Satker Provinsi untuk menegur Tim Fasilitator Masyarakat	LAI-74/PW31/2/2016	ST-173/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS Tahun Anggaran 31 Desember 2015 pada Dinas PU Kab. Gorontalo Utara	0
			I.03	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada TFM dan Fasilitator Kabupaten atas kurang maksimalnya pengawasan dan bimbingan secara teknis dan administratif untuk menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2015	0
				Kepala Satker Pamsimas Kabupaten Bone Bolango kami merekomendasikan agar menginstruksikan KKM Desa tersebut di atas bersama dengan BPSPAMS yang telah ditunjuk untuk melengkapi dokumen hasil uji laboratorium kualitas air (paska) dan melakukan perbaikan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas sistem penyediaan air minum.	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2016	0
				Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Fasilitator Masyarakat dan Fasilitator Kabupaten atas kurang maksimalnya pendampingan dan pengawasan program Pamsimas II	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2017	0

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
			I.04	Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Bupati agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk: (1) Memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas di Kabupaten Gorontalo agar mengajukan klaim dana non kapitasi tidak lebih dari tanggal 10 setiap bulannya; (2) Memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas agar segera mengajukan klaim non kapitasi atas pelayanan tahun 2015 tersebut. (3) Membayarkan dana non kapitasi yang belum dibayarkan kepada Puskesmas terkait; (4) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dana non kapitasi yang telah diterima di rekening penampungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dengan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo.	LAI-79/PW31/2/2016	ST-208/PW31/2/2016	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk FKTP Tahun 2015 pada Kabupaten Gorontalo	0
			I.08	kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui PJOK agar menginstruksikan Pelaksana Kegiatan Desa Batu Kramat untuk menyetorkan biaya penyuluhan esehatan sebesar Rp2.027.000,00 ke kas Kelompok Kerja (Pokja) di UPK	LAI-89/PW31/2/2016	ST-258/PW31/2/2016	Audit Dukungan Atas Laporan Keuangan PNPm Generasi Grant TF 14769 Kabupaten Boalemo TA 2015	0
				kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui PJOK agar menginstruksikan Pelaksana Kegiatan Desa Tangkoku untuk menyetorkan biaya pelatihan kader BKB sebesar Rp1.150.000,00 ke kas Kelompok Kerja (Pokja) di UPK.	LAI-89/PW31/2/2016	ST-258/PW31/2/2016	Audit Dukungan Atas Laporan Keuangan PNPm Generasi Grant TF 14769 Kabupaten Boalemo TA 2016	0
				kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui PJOK agar menginstruksikan ketua UPK Mananggu menyetorkan biaya konsumsi sebesar Rp1.000.000,00 Tersebut ke kas UPK dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten supaya melaksanakan tugasnya sesuai PTO	LAI-89/PW31/2/2016	ST-258/PW31/2/2016	Audit Dukungan Atas Laporan Keuangan PNPm Generasi Grant TF 14769 Kabupaten Boalemo TA 2017	0
			I.10	Terhadap permasalahan tersebut, kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran kami merekomendasikan agar : (1) memerintahkan kepada UPK Kecamatan Bongomeme dan PK Desa Tobumela untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana masing-masing sebesar Rp6.630.000,00 dan Rp2.994.700,00 serta mengadministrasikan bukti pertanggungjawaban dengan baik.	LAI-90/PW31/2/2016	ST-256/PW31/2/2016	Audit Dukungan Atas Laporan Keuangan PNPm Generasi Grant TF 14769 Kabupaten Gorontalo TA 2015	0
				(2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Fasilitator Kecamatan Bongomeme atas kurang optimalnya dalam melakukan pendampingan.	LAI-90/PW31/2/2016	ST-256/PW31/2/2016	Audit Dukungan Atas Laporan Keuangan PNPm Generasi Grant TF 14769 Kabupaten Gorontalo TA 2016	0
			I.14	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional B06 Tahun 2016 Per 30 Juni 2016 di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	LPM-134/PW31/2/2016	ST-456/PW31/2/2016	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional B06 Tahun 2016 Per 30 Juni 2016 di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	0

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
			I.15	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo	LPM-135/PW31/2/2016	ST-454/PW31/2/2016	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo	0
			I.16	1. menginstruksikan KKM Desa Tanjung Karang, Pilohulata dan Iloheluma untuk segera menyelesaikan pekerjaannya	LAI-74/PW31/2/2016	ST-173/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS Tahun Anggaran 31 Desember 2015 pada Dinas PU Kab. Gorontalo Utara	0
				2. berkoordinasi dengan Satker Provinsi untuk menegur Tim Fasilitator Masyarakat Desa Tanjung Karang, Pilohulata dan Iloheluma	LAI-74/PW31/2/2016	ST-173/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS Tahun Anggaran 31 Desember 2015 pada Dinas PU Kab. Gorontalo Utara	0
				3. menginstruksikan BP-SPAMS masing-masing desa penerima Program PAMSIMAS untuk segera melengkapi rencana kerja yang diperlukan.	LAI-74/PW31/2/2016	ST-173/PW31/2/2016	Audit Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS Tahun Anggaran 31 Desember 2015 pada Dinas PU Kab. Gorontalo Utara	0
			I.17	1. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada fasilitator masyarakat sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku	LAI-75/PW31/2/2016	ST-176/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Gorontalo (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2015	0
				2. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada fasilitator masyarakat sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku	LAI-75/PW31/2/2016	ST-176/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Gorontalo (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2016	0
			I.18	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada TFM dan Fasilitator Kabupaten atas kurang maksimalnya pengawasan dan bimbingan secara teknis dan administratif untuk menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan;	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2015	0
				2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango agar menginstruksikan kepada Koordinator KKM dan Ketua Satlak Desa Poduwoma untuk segera menyelesaikan pekerjaan fisiknya	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2016	0
				3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango agar menginstruksikan Kepala Satker Pamsimas Kabupaten Bone Bolango dan KKM untuk segera melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan.	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2017	0
				4. Kepala Satker Pamsimas Kabupaten Bone Bolango kami merekomendasikan agar menginstruksikan KKM Desa tersebut di atas bersama dengan BPSPAMS yang telah ditunjuk untuk melengkapi dokumen hasil uji laboratorium kualitas air (paska) dan melakukan perbaikan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas sistem penyediaan air minum.	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2018	0
				5. Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Fasilitator Masyarakat dan Fasilitator Kabupaten atas kurang maksimalnya pendampingan dan pengawasan program Pamsimas II;	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2019	0

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
				6. Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango agar menginstruksikan Fasilitator Masyarakat untuk membimbing KKM dalam melengkapi kekurangan dokumen administratif program Pamsimas II Tahun Anggaran 2015.	LAI-78/PW31/2/2016	ST-169/PW31/2/2016	Audit atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS II Kabupaten Bone Bolango (Loan IBRD No.8259-ID) untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2020	0
			I.19	1. Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Bupati agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk: (1) Memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas di Kabupaten Gorontalo agar mengajukan klaim dana non kapitasi tidak lebih dari tanggal 10 setiap bulannya; (2) Memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas agar segera mengajukan klaim non kapitasi atas pelayanan tahun 2015 tersebut. (3) Membayarkan dana non kapitasi yang belum dibayarkan kepada Puskesmas terkait; (4) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dana non kapitasi yang telah diterima di rekening penampungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dengan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo.	LAK-79/PW31/2/2016	ST-208/PW31/2/2016	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk FKTP Tahun 2015 pada Kabupaten Gorontalo	0
				2. Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Bupati agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk: (1)Memerintahkan tim pengendali JKN memutakhirkan jumlah peserta PBI APBN, APBD I setiap bulan, sesuai data peserta dari SK. Kementerian Sosial, SK. Gubernur Gorontalo serta SK Bupati Gorontalo dan perubahannya; (2)Memerintahkan Forum Kemitraan BPJS Kesehatan Tingkat Kabupaten Gorontalo tidak hanya membahas kepesertaan PBI APBD I Kabupaten Gorontalo saja, tetapi juga kepesertaan PBI APBN, sehingga seluruh kepesertaan PBI yang dilayani kesehatannya di wilayah Kabupaten Gorontalo dapat diketahui secara lengkap dan mutakhir. (3)Melakukan rekonsiliasi data peserta PBI APBN, PBI APBD I, dan PBI APBD I dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo.	LAK-79/PW31/2/2016	ST-208/PW31/2/2016	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk FKTP Tahun 2015 pada Kabupaten Gorontalo	0
				3. Terhadap permasalahan tersebut kami merekomendasikan kepada Bupati agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk melaporkan PBF tersebut atas ketidaksanggupannya dalam merealisasikan pesanan obat kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat dikenakan sanksi.	LAK-79/PW31/2/2016	ST-208/PW31/2/2016	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk FKTP Tahun 2015 pada Kabupaten Gorontalo	0

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
			1.20	1. Kepada Bupati Bone Bolango agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango untuk memerintahkan Tim Monev JKN memutakhirkan jumlah peserta PBI APBN, APBD I dan II setiap bulan, sesuai data peserta dari SK Menteri Sosial, SK Gubernur Gorontalo serta SK Bupati Bone Bolango dan perubahannya dari BPJS Cabang Gorontalo	LAK-80/PW31/2/2016	ST-202/PW31/2/2016	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk FKTP Tahun 2015 pada Kabupaten Bone Bolango	0
				2. Forum Kemitraan BPJS Kesehatan Tingkat Kabupaten Bone Bolango untuk membahas kepesertaan PBI APBN dan APBD I Provinsi Gorontalo, sehingga basis data seluruh kepesertaan PBI yang dilayani kesehatannya di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat diketahui secara lengkap dan up to date	LAK-80/PW31/2/2016	ST-202/PW31/2/2016	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk FKTP Tahun 2015 pada Kabupaten Bone Bolango	0
				3. Kepada Bupati Bone Bolango agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Boalngo untuk bersurat kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo dan memberikan tembusan data jumlah kepesertaan PBI baik APBN dan APBN II yang didaftarkan ke FKTP dan hasil pertemuan Forum Kemitraan maupun Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Peserta ke Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango secara lengkap setiap bulan.	LAK-80/PW31/2/2016	ST-202/PW31/2/2016	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk FKTP Tahun 2015 pada Kabupaten Bone Bolango	0
			1.21	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo untuk melaporkan PBF tersebut atas ketidaksanggupannya dalam merealisasikan pesanan obat melalui e-catalog atau e-purchasing kepada Kementerian Kesehatan dan Kepala LKPP untuk dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	LAK-229/PW31/2/2016	ST-621/PW31/2/2016	Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK pada Kabupaten Boalemo Tahun 2015	0
				2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo agar menginstruksikan Puskesmas Sari Tani dan Manangu melaporkan obat yang kadaluarsa disertai dengan Berita Acara permohonan pemusnahan obat kadaluarsa.	LAK-229/PW31/2/2016	ST-621/PW31/2/2016	Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK pada Kabupaten Boalemo Tahun 2016	0
			1.22	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato agar: 1. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato; 2. Mengupayakan proses pengadaan obat dan BHP yang lebih cepat untuk mengisi kekurangan obat yang dibutuhkan Puskesmas yang belum dapat dipenuhi oleh Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato agar tidak terjadi kehabisan obat (stock out) di Puskesmas.	LAK-227/PW31/2/2016	ST-617/PW31/2/2016	Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK pada Kabupaten Pohuwato Tahun 2015	0
				2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato agar menginstruksikan petugas yang mendata desa dan kelurahan Siaga Aktif untuk melengkapi data pendukungnya sesuai ketentuan dan melengkapinya dengan Surat Penetapan dari Bupati atau Kepala Desa.	LAK-227/PW31/2/2016	ST-617/PW31/2/2016	Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK pada Kabupaten Pohuwato Tahun 2016	0
			1.23	1. Kepada Bupati Pohuwato melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato agar menginstruksikan KPA tersebut untuk mempertanggungjawabkan terjadinya ketidakwajaran harga sebesar Rp34.586.400,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	LAK-240/PW31/2/2016	ST-609/PW31/2/2016	Audit Kinerja Atas Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) Tahun 2015 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo	0
	APD		1.24	Kepala BPKAD melakukan sosialisasi mengenai tata cara penatausahaan keuangan dengan menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual Seluruh SKPD untuk menyampaikan data-data yang diperlukan dan menyusun Laporan Keuangan masing-masing SKPD	LBA-6/PW31/3/2016 tgl 28 Januari 2016	ST-22/PW31/3/21016	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2015	1

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
				Seluruh SKPD agar melakukan penginputan data aset tetap atas realisasi belanja modal tahun 2015				
			I.25	Kepala BPKAD melakukan sosialisasi mengenai tata cara penatausahaan keuangan dengan menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual Seluruh SKPD untuk menyampaikan data-data yang diperlukan dan menyusun Laporan Keuangan masing-masing SKPD Seluruh SKPD agar melakukan penginputan data aset tetap atas realisasi belanja modal tahun 2015	LBA-30/PW31/3/2016 tgl 14 Maret 2016	ST-130/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Bome Bolango Tahun 2015	1
			I.26	Seluruh SKPD untuk menyampaikan data-data yang diperlukan untuk selanjutnya dilakukan pengakuan melalui jurnal penyesuaian/koreksi Seluruh SKPD untuk menyusun Laporan Keuangan masing-masing SKPD Dinas Pendidikan Boalemo agar menyelesaikan penginputan data aset tetap tahun 2015 sehingga daftar aset tetap Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2015 dapat diterbitkan sebagai pendukung dalam laporan keuangan	LBA-32/PW31/3/2016 tgl 10 Maret 2016	ST-128/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2015	1
			I.27	Seluruh Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah kabupaten Pohuwato untuk memerintahkan pengurus barang dan bagian akuntansi agar segera menyelesaikan penginputan data aset tetap Seluruh Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah kabupaten Pohuwato untuk memerintahkan PPK-SKPD masing-masing untuk menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 Memerintahkan Kepala Desa membuat laporan penyaluran dan realisasi penggunaan dana desa tahun 2015	LBA-48/PW31/3/2016 tgl 11 April 2016	ST-188/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2015	1
			I.28	Kepala BPKAD agar melakukan penyempurnaan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 dengan terlebih dahulu melakukan penyelesaian penginputan data aset dan perhitungan penyusutannya Kepala Dinas Pendidikan agar menyelesaikan penginputan data aset tetap tahun 2015, data aset tetap BOS, data aset tetap PRODIRA dan data aset tetap Bansos ke dalam Aplikasi SIMDA BMD	LBA-47/PW31/3/2016 tgl 11 April 2016	ST-198/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2015	1
			I.29	Kepala Bidang Akuntansi untuk mempercepat penginputan data jurnal koreksi Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat dokumen pendukung atas PAD sehingga bidang akuntansi bisa melakukan jurnal koreksi Kepala Bidang Akuntansi untuk mempercepat penginputan dan melakukan posting data belanja Kepala Bidang Aset untuk segera melakukan rekonsiliasi aset tetap per SKPD dengan Kepala Bidang Akuntansi	LBA-46/PW31/3/2016 tgl 11 April 2016	ST-156/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kota Gorontalo Tahun 2015 Asistensi Penyusunan LKPD Kota Gorontalo Tahun 2015	1
			I.30	Kepala BKAD melakukan sosialisasi mengenai tata cara penatausahaan keuangan dengan menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual	LBA-51/PW31/3/2016 tgl 13 April 2016	ST-148/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015	1
			I.31	Seluruh SKPD agar melakukan penginputan data aset tetap pada aplikasi SIMDA BMD agar nilai akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014, beban penyusutan tahun 2015, dan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2015 dapat dihitung	LBA-51/PW31/3/2016 tgl 13 April 2017	ST-148/PW31/3/2017	Asistensi Penyusunan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015	1
			I.32	Seluruh SKPD agar melakukan penginputan data aset tetap atas realisasi belanja modal tahun 2015 sehingga daftar aset tetap per 31 Desember 2015 dapat diterbitkan sebagai pendukung dalam laporan keuangan	LBA-51/PW31/3/2016 tgl 13 April 2018	ST-148/PW31/3/2018	Asistensi Penyusunan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015	1

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
			I.33	Kepala Bidang Akuntansi untuk mempercepat penginputan data jurnal koreksi Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat dokumen pendukung atas PAD sehingga bidang akuntansi bisa melakukan jurnal koreksi Kepala Bidang Akuntansi untuk entry data dana kapitasi dan untuk meneliti kembali transaksi di DPPKAD serta melakukan posting jurnal Kepala Bidang Aset untuk segera melakukan rekonsiliasi aset tetap per SKPD dengan Kepala Bidang Akuntansi	LBA-37/PW31/3/2016 tgl 18 Maret 2016	ST-126/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 Asistensi Penyusunan LKPD Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 Asistensi Penyusunan LKPD Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 Asistensi Penyusunan LKPD Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015	1
			I.34	Kepala Bidang Akuntansi untuk mempercepat penginputan data jurnal koreksi Kepala Bidang Akuntansi untuk mempercepat penginputan dan melakukan posting data belanja Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat dokumen pendukung atas PAD sehingga bidang akuntansi bisa melakukan jurnal koreksi Kepala Bidang Aset untuk segera melakukan rekonsiliasi aset tetap per SKPD dengan Kepala Bidang Akuntansi	LBA-31/PW31/3/2016 tgl 14 Maret 2016	ST-150/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Bome Bolango Tahun 2015	1
			I.35	Seluruh Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah kabupaten Gorontalo untuk memerintahkan PPK-SKPD masing-masing untuk menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 Para Kepala Desa agar membuat laporan penyaluran dan realisasi penggunaan dana desa tahun 2015	LBA-58/PW31/3/2016 tgl 19 April 2016	ST-194/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Kab Gorontalo Tahun 2015	1
			I.36	Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo agar melakukan penginputan data aset tetap atas realisasi belanja modal semester I tahun 2016 sebagai pendukung dalam penerbitan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016	LBA-142/PW31/3/2016 tgl 19 Agustus 2016	ST-494/PW31/3/2016	Asistensi Penyusunan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015	1
			I.37	Kepala DKAD untuk melakukan sosialisasi tata cara penatausahaan keuangan dengan menggunakan program aplikasi Simda Keuangan berbasis akrual khususnya tata cara menginput pengajuan SPP kepada seluruh operator Simda Keuangan (menurut jenis tagihan) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga tidak terjadi kesalahan pengakuan Aset Tetap dan KDP-nya	LBA-142/PW31/3/2016 tgl 19 Agustus 2017	ST-494/PW31/3/2017	Asistensi Penyusunan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2016	1
			I.38	Kepala DKAD untuk melakukan pencatatan/penatausahaan secara tertib atas transaksi Persediaan, Piutang PKB, Pendapatan Diterima Dimuka dengan menggunakan program aplikasi atau secara manual yang dapat menyajikan data secara up to date	LBA-142/PW31/3/2016 tgl 19 Agustus 2018	ST-494/PW31/3/2018	Asistensi Penyusunan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017	1
			I.39	Kepala DKAD untuk memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan rekonsiliasi atas selisih antara buku besar pembantu bank dengan saldo pada Rekening Koran Bank sebesar Rp70.512.916.666,00 sehingga posisi saldo kas per 30 Juni 2016 sesuai dengan angka yang sebenarnya	LBA-142/PW31/3/2016 tgl 19 Agustus 2019	ST-494/PW31/3/2019	Asistensi Penyusunan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2018	1
			I.40	Membuat Peraturan Bupati Bone Bolango yang mengatur tentang prosedur pendataan potensi, penetapan jumlah pajak terutang, tata cara pembayaran oleh wajib pajak, serta tata cara penagihannya.	LEV-149/PW31/3/2016 tanggal 7 September 2016	ST-417/PW31/3/2016	Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	1
			I.41	Menginstruksikan Kepala DPPKAD Kabupaten Bone Bolango dan Kepala SKPD terkait lainnya yang mengelola PAD untuk: a. Melakukan pendataan secara menyeluruh atas wajib pajak, obyek pajak, wajib retribusi dan obyek retribusi baik di perkotaan maupun di tingkat kecamatan dan desa; b. Menyusun database berbasis sistem informasi agar pengelolaan PAD dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menambah ruang fiskal untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; c. Melaksanakan penetapan pemungutan pajak hotel/kos-kosan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku.	LEV-149/PW31/3/2016 tanggal 7 September 2017	ST-417/PW31/3/2017	Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	1

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
			I.42	Menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango untuk: a. Menyusun data potensi retribusi pasar dengan memperhatikan antara lain jumlah pedagang/penjual, luasan lahan yang digunakan, tenda yang digunakan, jumlah kios, dan pengenaan retribusi pasar sesuai tarif yang ada; b. Melakukan pemungutan retribusi pasar secara optimal dengan memperhatikan antara lain jumlah pedagang/penjual, luasan lahan yang digunakan, tenda yang digunakan, jumlah kios, dan pengenaan retribusi pasar sesuai tarif yang berlaku	LEV-149/PW31/3/2016 tanggal 7 September 2018	ST-417/PW31/3/2018	Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	1
			I.43	Menata pengelolaan keuangan lebih akuntabel dengan memperhatikan ketaatan kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (<i>Adequate Disclosure</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern	LAP-174/PW31/3/2016 tanggal 28 September 2016	ST-598/PW31/3/2016 tanggal 20 September 2016	Kompilasi LKPD TA 2015 Seluruh Provinsi Gorontalo Seluruh Pemda di Gorontalo	1
			I.44	Mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD untuk meningkatkan derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan asli daerah				1
			I.45	Melakukan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan pada Hasil Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang pada Buku II tentang Hasil Audit atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III tentang Hasil Audit atas Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan				1
			I.46	Membuat Peraturan Bupati Gorontalo Utara yang mengatur tentang prosedur pendataan potensi, penetapan jumlah pajak terutang, tata cara pembayaran oleh wajib pajak, serta tata cara penagihannya Menginstruksikan Kepala DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara dan Kepala SKPD terkait lainnya yang mengelola PAD untuk: a. Melakukan pendataan secara menyeluruh atas wajib pajak, obyek pajak, wajib retribusi dan obyek retribusi baik di perkotaan maupun di tingkat kecamatan dan desa; b. Melaksanakan penetapan, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang didahului dengan pelaksanaan pengawasan lapangan; Menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara untuk: a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang/penjual yang menggunakan sarana/fasilitas pasar tentang peraturan yang menjadi dasar pemungutan retribusi pasar dan tata cara pemungutannya; b. Menyusun data potensi retribusi pasar dengan memperhatikan antara lain jumlah pedagang/penjual, luasan lahan yang digunakan, tenda yang digunakan, jumlah kios, dan pengenaan retribusi pasar sesuai tarif yang ada;	LEV-173/PW31/3/2016 tanggal 22 September 2016	ST-464/PW31/3/2016 Tanggal 29 Juli 2016	Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015 & 2016	1 1 1
			I.47	Kepada Bupati/Walikota agar meningkatkan capaian kinerjanya terhadap IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah Kepada Bupati/Walikota agar meningkatkan capaian kinerjanya terhadap Aspek Administrasi Umum IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah	LHE-185/PW31/3/2016 tanggal 19 Oktober 2016	ST-627/PW31/3/2016 tanggal 30 September 2016	Kompilasi EKPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015	1 1
		AN	I.48	Menyusun prosedur operasi standar perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan pendukungnya; Menyusun sistem pengendalian intern yang efektif, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian; terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian	LEV-150/PW31/4/2016 tanggal 7 September 2016	ST-470/PW31/4/2016 tanggal 1 Agustus 2016	Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Pada Kabupaten Boalemo	1 0.5
	Rekomendasi pengawasan perwakilan	APD	II.01	a. Menyusun database yang akurat berdasarkan hasil pendataan lapangan sesuai dengan jumlah pedagang yang sebenarnya pada masing-masing pasar di wilayah Kabupaten Pohuwato	LHE-202/PW31/3/2016 tanggal 28/10/2016	ST-596/PW31/3/2016	Evaluasi atas Program Lintas Sektorial Program Pemberdayaan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) Pohuwato	0

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8								
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8									
BPKP Nawacita				b. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola pasar yang dapat mendukung terwujudnya pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah				0								
				c. Memerintahkan mandor pasar untuk memungut retribusi pasar kepada seluruh pedagang/penjual yang menggunakan sarana/fasilitas di pasar yang masih mempunyai tanggungan kewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku				0								
			II.02	Menyusun Regulasi berupa Standar Operating Prosedur (SOP), Strategi pengembangan KSD dan Indikator Kinerja pelaksanaan KSD Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan Badan Kerja Sama Daerah yang bertugas untuk melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerja sama dengan mitra usaha				LHE - 186/PW31/3/2016 tanggal 20 Oktober 2016	ST-600/PW31/3/2016 tanggal 21 September 2016	Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Kerjasama Daerah (KSD) pada Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	1 1					
			AN	II.03				Menyusun metode pengumpulan data serta melakukan rekonsiliasi secara berkala atas beberapa sumber data sebelum digunakan untuk proses evaluasi SPM Meningkatkan peran dan layanan SPI dalam membantu pencapaian tujuan RSUD	LEV-98/PW31/4/2016	ST-287/PW31/4/2016	Evaluasi Kinerja RSUD Toto Kabila	0.5 0.5				
				II.04				melakukan pengujian uji atas limbah cair secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku melaksanakan survei kepuasan pelanggan pada beberapa pelayanan agar dapat mengukur mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	LEV-125/PW31/4/2016	ST-285/PW31/4/2016	Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Puhuwato	1 1				
			II.05	Meningkatkan kapasitas SPI agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan berlaku Melakukan penilaian risiko secara menyeluruh dalam pengelolaan Rumah Sakit Meningkatkan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi Melaksanakan pemantauan kinerja Rumah Sakit Meningkatkan keandalan data informasi serta ketepatan penyampaian informasi				LEV-103/PW31/4/2016	ST-289/PW31/4/2016	Evaluasi Kinerja BLUD MM Dunda	1 1 1 1					
			Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	APD				III.01	Menyusun SOP atau pedoman penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko atas kegiatan utama pada seluruh unit kerja, dan selanjutnya untuk mengkomunikasikan dan menerapkan SOP tersebut serta melakukan pemutakhiran daftar risiko secara terus menerus	LAP-51/PW31/3/2016 tgl 15 April 2016	ST-184/PW31/3/2016	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Boalemo	0			
									Menyusun SOP atau pedoman menyangkut analisis risiko dan mengkomunikasikan pedoman penilaian risiko, menyusun RTP atas risiko yang telah diidentifikasi, melakukan analisis risiko pada seluruh unit kerja, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan RTP dan pemutakhiran rencana tindak pengendalian secara terus menerus				0			
									Menyusun SOP atau pedoman penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko atas kegiatan utama pada seluruh unit kerja, dan selanjutnya untuk mengkomunikasikan dan menerapkan SOP tersebut serta melakukan pemutakhiran daftar risiko secara terus menerus				LAP-53/PW31/3/2016 tgl 19 April 2016	ST-182/PW31/3/2016	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Puhuwato Tahun 2016	0
									Menyusun SOP atau pedoman menyangkut analisis risiko dan mengkomunikasikan pedoman penilaian risiko, menyusun RTP atas risiko yang telah diidentifikasi, melakukan analisis risiko pada seluruh unit kerja, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan RTP dan pemutakhiran rencana tindak pengendalian secara terus menerus							0
Menyusun SOP atau pedoman penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko atas kegiatan utama pada seluruh unit kerja, dan selanjutnya untuk mengkomunikasikan dan menerapkan SOP tersebut serta melakukan pemutakhiran daftar risiko secara terus menerus	LAP-82/PW31/3/2016 tgl 8 Juni 2016	ST-37/PW31/3/2016			Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016	0										
Menyusun SOP atau pedoman penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko atas kegiatan utama pada seluruh unit kerja, dan selanjutnya untuk mengkomunikasikan dan menerapkan SOP tersebut serta melakukan pemutakhiran daftar risiko secara terus menerus						0										

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
				Menyusun SOP atau pedoman menyangkut analisis risiko dan mengkomunikasikan pedoman penilaian risiko, menyusun RTP atas risiko yang telah diidentifikasi, melakukan analisis risiko pada seluruh unit kerja, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan RTP dan pemutakhiran rencana tindak pengendalian secara terus menerus				0
			III.04	Menyusun SOP atau pedoman penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko atas kegiatan utama pada seluruh unit kerja, dan selanjutnya untuk mengkomunikasikan dan menerapkan SOP tersebut serta melakukan pemutakhiran daftar risiko secara terus menerus	LAP-75/PW31/3/2016 tgl 21 Juni 2016	ST-228/PW31/3/2016	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2016	0
				Menyusun SOP atau pedoman menyangkut analisis risiko dan mengkomunikasikan pedoman penilaian risiko, menyusun RTP atas risiko yang telah diidentifikasi, melakukan analisis risiko pada seluruh unit kerja, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan RTP dan pemutakhiran rencana tindak pengendalian secara terus menerus				0
			III.05	Menyusun SOP atau pedoman penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko atas kegiatan utama pada seluruh unit kerja, dan selanjutnya untuk mengkomunikasikan dan menerapkan SOP tersebut serta melakukan pemutakhiran daftar risiko secara terus menerus	LAP-76/PW31/3/2016 tgl 21 Juni 2016	ST-210/PW31/3/2016	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo	0
				Menyusun SOP atau pedoman menyangkut analisis risiko dan mengkomunikasikan pedoman penilaian risiko, menyusun RTP atas risiko yang telah diidentifikasi, melakukan analisis risiko pada seluruh unit kerja, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan RTP dan pemutakhiran rencana tindak pengendalian secara terus menerus				0
			III.06	Menginstruksikan Kepala Bappeda Kabupaten Pohuwat untuk melakukan perbaikan atas penetapan target capaian yang tidak konsisten dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD)	LBA – 148/PW31/3/2016 tanggal 7 September 2016	ST-527/PW31/3/2016 tanggal 19 Agustus 2016	Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato	1
				Menginstruksikan Tim Penyusun RPJMD untuk lebih teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi data atas penetapan capaian target indikator kinerja program dan penetapan satuan dalam dokumen rancangan Renstra SKPD				1
			III.07	Menginstruksikan agar temuan pemeriksaan BPK RI segera ditindaklanjuti dengan menjalankan rencana aksi yang sedang dalam proses	LBA-187/PW31/3/2016 tanggal 11 Oktober 2016	ST-407/PW31/3/2016 tanggal 21 Juni 2016	Asistensi Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil Audit BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	1
		AN	III.08	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo untuk mendorong masing-masing kabupaten membuat program peningkatan pemakaian pupuk pola berimbang spesifik lokasi dengan menggunakan pupuk organik yang disinergikan program pupuk bersubsidi	LRA-144/PW31/4/2016 tanggal 2 September 2016	ST-513/PW31/4/2016 tanggal 15/08/2016	Reviu Ketahanan pangan tahun 2015 dan semester I tahun 2016 pada Pupuk Kalimantan Timur	1
				Disarankan kepada kepada PT Pupuk Kaltim untuk menginstruksikan Distributor pengecer tersebut untuk memberikan teguran dan pembinaan kepada para pengecer yang tidak membuat buku Penyaluran Pupuk ke Petani (F6) dengan tertib				0.5
			III.09	Melakukan koordinasi lebih intensif kepada pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait penggantian atas tanah dan bangunan yang terkena relokasi pembangunan kanal serta melakukan penghapusan atas tanah dan bangunan tersebut dari daftar aset tetap	LHM -223/PW31/4/2016 tanggal 17/11/2016	ST-733/PW31/4/2016, tanggal 7 November 2016	Review Hasil Inventarisasi dan Clearance Aset Tetap Perum Bulog	1
				Melakukan koordinasi ke Perum Bulog Pusat untuk melengkapi data aset tetap yang sudah ada di neraca maupun yang berada di luar neraca				1
				kepada Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie agar mempersiapkan RSUD menjadi BLUD dengan melengkapi persyaratan teknis, substantif dan administrasi serta merekrut tenaga administrasi yang memahami akuntansi sesuai dengan ketersediaan dana	LBA-191/PW31/4/2016 tanggal 25 Oktober 2016	ST-642/PW31/4/2016 tanggal 7 Oktober 2016	Asistensi Bimtek PTK BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	1

No 1	IKK		Rekomendasi Terpilih					TL 8	
	Uraian 2	Bidwas 3	No 4	Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8		
			III.10	kepada Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe agar menginstruksikan Bidang Perencanaan untuk merumuskan sasaran dan target kinerja produk unggulan rumah sakit sebagai penjabaran dari misi "Meningkatkan Produk Unggulan Rumah Sakit" dan berkoordinasi dengan bagian dan bidang yang terkait untuk segera menyelesaikan draft RSB tersebut	LBA-189/PW31/4/2016 tanggal 24/10/2016	ST-592/PW31/4/2016 tanggal 19 September 2016	Asistensi Bimbingan Teknis RSB Pada BLUD RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe	1	
				Melaksanakan penyediaan layanan pemulasaraan jenazah guna memenuhi kebutuhan SPM secara keseluruhan.	LBA-160/PW31/4/2016 tanggal 15 September 2016	ST-568/PW31/4/2016 tanggal 5 September 2016	Asistensi Evaluasi SPM RSUD Toto Kabila	0.5	
				Menggunakan metode komputerisasi dalam kegiatan adminstrasi pencatatan.				0.5	
			III.11	Kepada Direktur BLUD RSUD Toto Kabila kami sarankan untuk menginstruksikan Kepala Sub Bagian Perencanaan agar mempercepat penyelesaian evaluasi capaian indikator kinerja semester satu Tahun 2016 dan mempercepat penyusunan penyelesaian prognosa keuangan untuk tahun tahun 2016 dengan berkoordinasi dengan bagian dan bidang yang terkait	LBA-194/PW31/4/2016 tanggal 26 Oktober 2016	ST-644/PW31/4/2016 tanggal 7 Oktober 2016	Bimtek Penyusunan RBA RSUD Toto Kabila	0.5	
	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	P3APIP	IV.01	Inspektorat agar aktif memberikan jasa advis (advisory service)	LHP-154/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2016	ST-433/PW31/6/2016 tanggal 18 Juli 2016	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	0.5	
				Perlunya sosialisasi mengenai internal audit charter kepada seluruh auditan agar Inspektorat dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Sosialisasi ini dilakukan melalui kepala daerah agar seluruh auditan mematuhi Inspektorat agar menyusun kebijakan sistem rotasi internal	LHP-154/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2017	ST-433/PW31/6/2016 tanggal 18 Juli 2017	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	1	
					LHP-154/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2018	ST-433/PW31/6/2016 tanggal 18 Juli 2018	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	1	
				Inspektorat agar menyusun Pedoman Pola Hubungan	LHP-154/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2019	ST-433/PW31/6/2016 tanggal 18 Juli 2019	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	1	
				Untuk pengendalian mutu pengawasan, Inspektorat harus memiliki standar kendali mutu agar pelaksanaan pengawasan sesuai standar audit AAIP	LHP-154/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2020	ST-433/PW31/6/2016 tanggal 18 Juli 2020	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	1	
				Agar berkoordinasi dengan AAIP wilayah Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan telaah sejawat yang diharapkan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Disamping itu agar melaksanakan kegiatan <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP) secara berkala dalam lingkup internal inspektorat Kabupaten Gorontalo minimal setiap tahun. Metode pengukuran internal QAIP agar mengacu kepada pedoman telaah sejawat AAIP	LHP-154/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2021	ST-433/PW31/6/2016 tanggal 18 Juli 2021	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	0.5	
				Sebagai ringkasan atas hasil pengawasan selama periode tertentu, Inspektorat agar membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Daerah minimal setiap 6 bulan sekali	LHP-154/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2022	ST-433/PW31/6/2016 tanggal 18 Juli 2022	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	1	
				IV.02	Menyusun dan mendokumentasikan PKA, KKA, dan LHA sesuai dengan pedoman kendali mutu APIP	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2024	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2024	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1
				Membuat kebijakan organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2025	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2025	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1	
				Membuat kebijakan untuk perolehan gelar sertifikasi profesi (contoh: CFE) bagi pegawai	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2027	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2027	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	0.5	
				Membuat kebijakan pemberian penghargaan bagi tim/personal yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2028	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2028	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1	
				Menginformasikan mengenai risiko dan pengendaliannya kepada Kepala Daerah	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2030	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2030	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1	
				Merancang laporan hasil kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan para pemangku kepentingan yang utama secara tepat waktu dan berkala	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2032	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2032	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1	

No 1	IKK		No 4	Rekomendasi Terpilih				TL 8
	Uraian 2	Bidwas 3		Uraian 5	Ref 6	ST 7	Judul ST 8	
				Menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan kepada Kepala Daerah secara berkala	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2033	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2033	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1
				Mendokumentasikan Sistem Manajemen Kinerja dalam pengelolaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup: identifikasi data kinerja yang harus dikumpulkan, frekuensi pengumpulan data, siapa yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data, pengendalian mutu data, siapa yang menghasilkan laporan data kinerja, dan siapa yang menerima laporan	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2034	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2034	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	0.5
				Menyusun peta kompetensi pegawai	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2036	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2036	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1
				Membuat analisis beban kerja pegawai	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2037	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2037	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1
				Menyusun laporan realisasi diklat secara berkala	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2038	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2038	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1
				Membangun kebijakan dan prosedur dalam rangka berkomunikasi, berinteraksi, dan melaporkan kepada jajaran pimpinan K/L/Pemda yang bertugas mengawasi APIP	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2039	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2039	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	0.5
				Melakukan pertemuan secara berkala dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata kelola, penilaian risiko, pengawasan internal, dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat serta mendokumentasikan setiap pertemuan tersebut	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2040	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2040	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1
				Melakukan reviu atas <i>Internal Audit Charter</i> sesuai peran dan layanan level 3 APIP	LHP-153/PW31/6/2016 tanggal 9 September 2041	ST-429/PW31/6/2016 tanggal 15 Juli 2041	QA Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Gorontalo	1